

MEMBANGUN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN INDONESIA

Sebuah Peta Jalan Menuju 2030



Imprint

Published by the
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices
Bonn and Eschborn, Germany

Sustainable Economic Development through
Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung C Lantai 11
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta, 10270, Indonesia
T: +62-21-5785 2384, 5785 2385
F: +62-21-5785 2386
I: www.giz.de/en
E: sed-tvet@giz.de

As at
October 2016

Design and layout
Rino Hidayah

Text
Tim Penyusun Road Map SMK 2030

GIZ is responsible for the content of this publication

On behalf of the
German Federal Ministry for Economic Cooperation
And Development (BMZ)

MEMBANGUN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN INDONESIA

Sebuah Peta Jalan Menuju 2030



Diimplementasikan oleh:



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kata Pengantar

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai sebuah institusi pendidikan memiliki perbedaan tujuan dengan institusi pendidikan lainnya, yaitu lebih menekankan pada pengembangan kompetensi kerja yang spesifik (tertentu). Orientasi dari pendidikan menengah kejuruan adalah menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri.

Peta Jalan Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan ini disusun melalui proses diskusi dan wawancara dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, dunia usaha/dunia industri, para ahli serta praktisi pendidikan menengah kejuruan. Hasil diskusi dan wawancara selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam bentuk target yang akan dicapai pada tahun 2030, yang terdiri dari: (i) 100% - Keterlibatan dunia usaha/industri; (ii) 100% - Pengakuan kompetensi lulusan; (iii) 100% - Pengalaman industri bagi guru; serta (iv) 100% - Akreditasi A untuk Kompetensi Keahlian sesuai prioritas kebijakan Pemerintah di bidang Maritim, Pertanian, Pariwisata, dan Teknologi Informasi.

Peta Jalan ini diharapkan dapat menjadi alternatif panduan bagi sektor terkait, dunia usaha/industri, institusi, dan guru pendidikan menengah kejuruan dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan menengah kejuruan di Indonesia. Disadari bahwa Peta Jalan ini masih belum sempurna, oleh karenanya sangat diharapkan saran, tanggapan dan kritikan yang sifatnya membangun demi terwujudnya Peta Jalan yang ideal bagi pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan Indonesia yang berkualitas.

Ucapan Terima Kasih

Dokumen Peta Jalan Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan ini disusun berdasarkan inisiatif dari Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Inovasi dan Daya Saing bersama GIZ SED-TVET dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Tim Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, antara lain: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; Pusdiklat Perindustrian – Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas – Kemenaker; Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); LPMP DKI Jakarta; Dinas Pendidikan Prov. Jateng; SMKN 1 Bekasi; SMKN 2 Bekasi; SMKN 3 Bekasi; SMKN 4 Bekasi; SMKN 5 Bekasi; SMKN 6 Bekasi; SMKN 7 Bekasi; SMKN 1 Cikarang Barat; SMKN 1 Cikarang Utara; SMKN 1 Cikarang Selatan; SMKN 1 Cibinong; SMK Mitra Industri Bekasi; SMK Bagimu Negeriku Bekasi; SMKN 1 Jepara; SMKN 7 Semarang; SMKN 8 Semarang; SMKN 9 Semarang; SMK Mikael Solo; SMK Kristen Terang Bangsa; SMKN 2 Pengasih; SMKN 2 Adiwerna Tegal; SMKN 2 Magelang; SMK 2 Salatiga; Poltek ATK Jogja; SMTI Yogya; PTB – FKIP UNS; PT Cisco Indonesia; PT Brantas Abipraya; PT Jotun Indonesia; PT JFE Steel Galvanizing; PT Woo In; PT MM Industrial Development Bekasi; PT Janata Marina Indah; PT King Manufacture Solo; *Center Regulatory and Reform*; dan *Loop Indonesia*.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ucapan terima kasih	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Istilah dan Singkatan	v
Bab 01. Pendahuluan	2
1.1. Mengapa butuh Peta Jalan Pendidikan Kejuruan?	2
1.2. Tujuan penyusunan Peta Jalan	3
1.3. Acuan penyusunan Peta Jalan	3
1.4. Ruang lingkup Peta Jalan	4
1.5. Pengguna Peta Jalan	4
Bab 02. Kondisi Umum Pendidikan Kejuruan di Indonesia	6
2.1. Perkembangan Pendidikan Kejuruan	6
2.2. Kemitraan Pendidikan Kejuruan dengan DU/DI	7
2.3. Mutu Peserta Didik	9
2.4. Mutu Guru SMK	10
2.5. Mutu Satuan Pendidikan	11
Bab 03. Visi Pendidikan Kejuruan Indonesia 2030	13
3.1. Bersiap Menuju Indonesia 2030	13
3.2. Profil Lulusan Pendidikan Kejuruan tahun 2030	16
3.3. Penyiapan Pendidikan Menengah Kejuruan Indonesia untuk Kebutuhan 2030	18
Bab 4. Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan di Indonesia 2030	23
4.1. Target Utama Pendidikan Menengah Kejuruan Indonesia 2030	23
4.2. Tahapan Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan Indonesia	24
4.3. Kegiatan	25
Lampiran	29
Referensi	30

Daftar Istilah

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
ASEAN	: Association of South East Asia Nation
BAN S/M	: Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPS	: Badan Pusat Statistik
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAPODIK	: Data Pokok Pendidikan
DAU	: Dana Alokasi Umum
Ditjen Dikmen	: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Dit. PSMK	: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
K/L	: Kementerian/Lembaga
K-13	: Kurikulum 2013
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
LPTK	: Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MKPI	: Majelis Kemitraan Pendidikan Kejuruan dan Industri
PP	: Peraturan Pemerintah
Perpres	: Peraturan Presiden
PTK	: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Renstra	: Rencana Strategis
Rombel	: Rombongan Belajar
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPPNJP	: Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
Sarpras	: Sarana dan Prasarana
SDG	: <i>Sustainable Development Goal</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDP	: <i>School Development Plan</i>
SKL	: Standar Kompetensi Lulusan
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SP	: Sasaran Program
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
TEFA	: <i>Teaching Factory</i>
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TVET	: <i>Technical Vocational Education and Training</i>

BAB 01

Pendahuluan

1.1. MENGAPA BUTUH PETA JALAN PENDIDIKAN KEJURUAN?

Pendidikan Kejuruan harus dikembangkan sesuai dinamika sosial, ekonomi, dan politis:

Sekalipun Pendidikan Kejuruan di Indonesia telah dirintis sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda lebih dari satu abad yang lalu, perkembangannya tidak mengenal titik akhir. Sejarah Pendidikan Kejuruan di Indonesia menunjukkan evolusi sesuai dengan situasi dari berbagai periode. Setelah kemerdekaan hingga pada era reformasi, banyak perubahan terjadi yang menjadikan Pendidikan Kejuruan di Indonesia berpotensi besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015/2016 populasi SMK Negeri dan Swasta mencapai 13.131 sekolah dengan jumlah peserta didik sebesar 4,4 juta siswa. Ini sedikitnya 50% dari jumlah total siswa pendidikan menengah. Dengan berbagai potensi yang dimiliki serta tantangan yang dihadapi – di satu sisi – pengembangan Pendidikan Kejuruan harus dilakukan dengan terencana dan berkelanjutan. Namun – di sisi yang lain – pengembangan tersebut harus terlaksana secara luwes dengan prioritas yang sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politis yang ada.

Potensi ekonomi Indonesia dengan peluang bisnisnya yang besar membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan sikap kerja yang tepat:

Perekonomian Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan kondisinya yang relatif stabil. Pada tahun 2030, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara ke 7 dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia. Ini merupakan loncatan yang signifikan dari posisinya di peringkat ke 16 pada tahun 2012. Dalam jangka waktu 15 tahun ke depan, akan terjadi lonjakan kebutuhan tenaga kerja dari 55 juta pada saat ini menjadi 113 juta di tahun 2030. Peluang bisnis sebesar 1.8 triliun US Dollar – antara lain di bidang jasa, pertanian, dan perikanan – juga diproyeksikan akan tercipta (McKinsey, 2012). Oleh sebab itu tersedianya sumberdaya manusia (tenaga kerja) dalam jumlah memadai dan dengan keterampilan yang tepat bisa membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi investasi yang bisa menggerakkan pembangunan.

Bonus demografi Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal:

Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi demografi. Bonus demografi Indonesia yang diproyeksikan berlangsung hingga 2025/ 2030, membuka peluang tersedianya penduduk usia kerja (15 – 64) dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak tertanggung dan penduduk lanjut usia. Jika dimanfaatkan secara optimal, yaitu dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan sikap kerja yang tepat, bonus demografi ini dapat membuat negara menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang.

Integrasi ekonomi di kawasan mendesak peningkatan daya saing bangsa:

Pergerakan ekonomi regional dan global sangat berpengaruh pada ekonomi nasional. Di kawasan Asia Tenggara, integrasi ekonomi regional bergerak melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan MEA, negara-negara ASEAN bersepakat untuk menjadi pasar tunggal dengan basis produksi di kawasan. MEA bertujuan mengubah ASEAN menjadi wilayah dengan pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Dengan ditunjang oleh berbagai kebijakan antar negara yang lebih harmonis. Integrasi ekonomi ini menyebabkan makin mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan daya saing bangsa baik di tingkat regional maupun global, terutama dalam penyediaan tenaga kerja yang mampu menjadi bagian dari dinamika sosial, ekonomi, dan politis seperti MEA.

Sumber Daya Manusia Industri perlu dipersiapkan melalui Pendidikan Kejuruan yang selaras dengan kebutuhan sektor industri:

Pembangunan Industri Nasional (seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional/RIPIN 2015 – 2035) mencita-citakan Indonesia menjadi negara industri yang tangguh dan menjadikan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Ini juga makin dipertegas oleh rencana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan populasi industri skala menengah dan besar sekitar 9000 usaha hingga tahun 2019. Untuk itu, sumber daya manusia industri perlu disiapkan secara terencana sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau perkembangan kawasan industri yang ada. Berbagai tantangan seperti tidak sesuainya pasokan lulusan dari sektor pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja sektor industri perlu segera ditangani. Sektor pendidikan – khususnya Pendidikan Kejuruan – dan sektor industri harus menjadi mitra yang mampu bekerjasama secara efektif. Pengembangan Pendidikan Kejuruan harus selaras dengan pembangunan dan kebutuhan industri.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PETA JALAN

Peta Jalan merupakan desain perencanaan yang inspiratif dan bisa menjadi rujukan bagi pengembangan serta pelaksanaan Pendidikan Kejuruan untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Tujuan penyusunan Peta Jalan:

- a. Memberi petunjuk arah perubahan dan merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Kejuruan di Indonesia
- b. Menjadi pedoman dalam mengintegrasikan berbagai bidang pengembangan Pendidikan Kejuruan dalam satu rencana yang memiliki visi, prioritas, target, strategi serta tahapan pencapaian yang jelas
- c. Mendukung pelaksanaan Renstra (2015 – 2019)
- d. Menjadi acuan/referensi bagi pengembangan Renstra Kemdikbud yang akan datang (2020 – 2024, 2025 – 2030)
- e. Mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan sektor Pendidikan Kejuruan

1.3. ACUAN PENYUSUNAN PETA JALAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas telah mengamanatkan tujuan nasional dari Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan ini telah dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan.

Peta Jalan Pendidikan Kejuruan Indonesia 2030 ini adalah bagian dari dokumen perencanaan yang terkait dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia dari berbagai aspek. Oleh sebab itu, penyusunan Peta Jalan harus mengacu pada beberapa dokumen perencanaan pembangunan yang relevan. Dalam tujuh misinya, Nawacita menyentuh peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dan daya saing bangsa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 menjabarkannya lebih jauh dalam sasaran pembangunan manusia dan masyarakat melalui pendidikan. Penting bagi pengembangan Pendidikan Kejuruan untuk mengacu pada arah kebijakan bidang pendidikan RPJMN yang menekankan: (i) penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah; (ii) peningkatan relevansi Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja; (iii) peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Program *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menjadi arahan strategis Program Pembangunan Jangka Panjang di Indonesia (2005 – 2025) menegaskan pentingnya menggunakan sumberdaya, posisi strategis serta tenaga kerja Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Seluruh pemangku kepentingan – khususnya pemerintah dan sektor swasta – harus bermitra secara produktif. Sektor swasta akan berperan lebih besar dalam perkembangan ekonomi khususnya pada investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu dari tiga elemen yang diintegrasikan dalam MP3EI adalah penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan IPTEK untuk mendukung program-program di tiap koridor ekonomi.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035 sebagaimana tertuang dalam PP No. 14 tahun 2015 mempertegas keseriusan pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Dengan RIPIN, industri akan dipersiapkan sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Salah satu aspek yang erat terkait dengan RIPIN adalah ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Ini sangat penting, terutama setelah pasar bebas tenaga kerja di ASEAN menjadi kenyataan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembangunan tenaga kerja industri menjadi kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi oleh pendidikan vokasi, Pendidikan Kejuruan, pelatihan kerja, dan pemagangan. Dalam pelaksanaannya, semua harus didukung oleh pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) secara efektif.

Berbagai dokumen perencanaan pembangunan tersebut diatas menggaris-bawahi makin pentingnya:

- Peningkatan kompetensi, sikap kerja serta daya saing tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- Pengerahan upaya yang lebih besar untuk mewujudkan kemitraan efektif dan produktif antara Pendidikan Kejuruan dengan sektor dunia usaha/dunia industri.

Direktorat Pembinaan SMK – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjawab tantangan tersebut dengan upaya lebih konkrit untuk menyelaraskan proses pembelajaran di SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI). Renstra Direktorat PSMK 2015 – 2019 menjelaskan pembentukan subdirektorat baru yaitu Sub Direktorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri. Ini merupakan langkah strategis untuk melibatkan masyarakat terutama sektor swasta dalam pengembangan SMK.

Pada tingkat global, pelaksanaan Peta Jalan ini pada akhirnya perlu mengacu dan berkontribusi pada pencapaian pembangunan dunia yang berkelanjutan melalui *'The 2030 Agenda for Sustainable Development'*, terutama terkait pada goal-4: *Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*. Pada tahun 2030, baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang setara terhadap Pendidikan Kejuruan dan vokasi yang terjangkau dan berkualitas. Selain itu, pada tahun 2030, harus ada kenaikan jumlah secara substansial dari generasi muda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan untuk memperoleh pekerjaan yang bermartabat serta untuk berwirausaha.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan sumberdaya manusia melalui Pendidikan Kejuruan sebagaimana yang dirumuskan oleh berbagai dokumen perencanaan pembangunan tersebut di atas, Peta Jalan ini akan berfokus pada peningkatan kualitas (kompetensi dan sikap kerja) lulusan SMK dan keterlibatan dunia usaha/dunia industri dalam pengembangan Pendidikan Kejuruan.

1.4. RUANG LINGKUP PETA JALAN

Lingkup pembahasan dalam Peta Jalan ini mencakup upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas Pendidikan Kejuruan sampai dengan tahun 2030, terdiri dari uraian kegiatan yang dilakukan dan penetapan kebijakan yang relevan.

1.5. PENGGUNA PETA JALAN

Peta Jalan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan Pendidikan Kejuruan, antara lain:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
 - Sebagai acuan pengembangan kebijakan peningkatan kualitas Pendidikan Kejuruan sehingga tercipta kondisi Pendidikan Kejuruan yang mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan DU/DI;

- b. Kementerian Teknis Terkait:
 - Sebagai acuan pengembangan kebijakan peningkatan kualitas Pendidikan Kejuruan sehingga tercipta kondisi Pendidikan Kejuruan yang dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan dunia kerja;
- c. Dinas Pendidikan
 - Sebagai acuan dalam penguatan kapasitas dan kerjasama antar dunia usaha/dunia industri dengan institusi Pendidikan Kejuruan;
- d. Institusi Pendidikan
 - Sebagai acuan dalam penguatan dan perluasan kerjasama antar institusi pendidikan dengan DU/DI;
- e. Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)
 - Sebagai acuan dalam perluasan keterlibatan DU/DI dalam peningkatan kualitas Pendidikan Kejuruan;
- f. Masyarakat
 - Sebagai acuan dalam penguatan sinergi antara masyarakat, institusi pendidikan, dan DU/DI.

BAB 02

Kondisi Umum Pendidikan Kejuruan di Indonesia

2.1. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Pendidikan Kejuruan di Indonesia telah berumur 150 (seratus lima puluh) tahun lebih, sejarah mencatat sekolah kejuruan pertama pada jaman Belanda tahun 1853 adalah Ambacht School Van Soerabaia (Sekolah Pertukangan Surabaya) sedangkan di Bandung di buka Ambacht School and Ambacht Leergang (yang kemudian menjadi Sekolah Teknik Ciroyom). Pada jaman itu Pendidikan Kejuruan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Belanda, hingga awal kemerdekaan konsep Pendidikan Kejuruan mengikuti konsep Pendidikan Kejuruan di Belanda.

Sejak penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang digulirkan pada tahun 1969 bentuk Pendidikan Kejuruan mulai mengadopsi model dari negara lain dan secara bertahap Pendidikan Kejuruan mendapat tempat pada sistem pendidikan Indonesia. Tonggak pengembangan Pendidikan Kejuruan secara terpadu di Indonesia dimulai pada Repelita V, melalui penetapan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dilanjutkan dengan ditetapkannya PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang memuat beberapa ketentuan dalam pengembangan Pendidikan Kejuruan. Dalam periode ini, melalui Kepmendikbud No. 490/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan mulai dilaksanakan juga pengembangan unit produksi sebagai bagian dari proses pembelajaran di SMK, kegiatan unit produksi ini meliputi kegiatan memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada di sekolah dan lingkungannya.

Kebijakan pengembangan lebih lanjut dilakukan pemerintah melalui penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) melalui konsep *Link and Match*, yang dituangkan dalam Kepmen No. 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan, kebijakan tersebut merupakan awal upaya pemerintah melibatkan dunia usaha/industri dalam Pendidikan Kejuruan. Sistem ini mengadopsi model *Dual System* di Jerman, dengan melakukan beberapa penyesuaian. Secara teoritis, PSG merupakan sistem pendidikan yang dianggap ideal untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi SMK. Praktik siswa di industri merupakan bagian dari kegiatan penerapan ini. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh SMK untuk melibatkan DU/DI antara lain melalui pelaksanaan kegiatan gebyar Pendidikan Kejuruan, penandatanganan kerja sama sekolah dengan DU/DI, pembentukan organisasi intern di sekolah, dan kunjungan guru-guru secara reguler ke dunia usaha/industri. Upaya ini ditindaklanjuti dengan Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) dan Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi.

Sesuai dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15, keberadaan SMK dirancang untuk mempersiapkan lulusannya bekerja di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah kejuruan ditujukan untuk penyiapan lulusan yang siap kerja, baik bekerja secara mandiri maupun bekerja pada industri tertentu. SMK dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah, masyarakat, dan DU/DI. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya, memiliki adaptasi, dan daya saing yang tinggi.

Dalam kurun waktu 2009 - 2014 telah dibangun sekitar 3.000 SMK baru dan hingga awal tahun 2016, jumlah SMK di Indonesia sudah mencapai 13.131 sekolah (3.380 SMK Negeri dan 9.751 SMK Swasta) dengan jumlah siswa mencapai 4,42 juta siswa yang terdiri dari 155 ribu rombongan belajar, dengan total paket keahlian¹ yang dibuka kurang lebih 33.000.

¹ Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah No. 7013/D/KP/2013 tentang spektrum pendidikan menengah kejuruan saat ini terdapat 128 paket keahlian yang berlaku di SMK

2.2. KEMITRAAN PENDIDIKAN KEJURUAN DENGAN DU/DI

Sejak pertengahan tahun 1990-an, kemitraan antara SMK dan DU/DI telah menjadi salah satu fokus utama dari kebijakan pembangunan Pendidikan Kejuruan di Indonesia. Landasan paradigmatik di belakang hal ini adalah konsep *link and match* yang bertitikberat pada keselarasan dan relevansi antara SMK dengan perkembangan pasar kerja dan DU/DI. Salah satu strategi untuk menerapkan konsep *link and match* adalah Pendidikan Sistem Ganda yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. PSG merupakan strategi proaktif yang mendekatkan peserta didik ke dunia kerja. Saat ini, keterlibatan DU/DI dalam pembangunan Pendidikan Kejuruan secara sistematis, aktif, dan efektif makin mendesak untuk dilaksanakan. Pendidikan Kejuruan masih sering dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan DU/DI dan oleh sebab itu kurang relevan². Selain perlu berorientasi pada perkembangan ekonomi makro serta kebijakan pembangunan nasional, Pendidikan Kejuruan makin dituntut untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi selaras dengan dinamika DU/DI sebagai penyedia lapangan kerja (Satuan Tugas Perumus Kebijakan Pendidikan Kejuruan, 1995)

Berbagai tantangan besar yang masih harus dihadapi oleh Pendidikan Kejuruan, seperti rendahnya keterserapan lulusan SMK di pasar kerja³, sering dikaitkan dengan tidak sesuaiya perkembangan Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan dan standar DU/DI. Tidak selarasnya Pendidikan Kejuruan dengan DU/DI dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, kesenjangan antara keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI dengan yang dimiliki oleh lulusan SMK. Kedua, jumlah lulusan SMK di berbagai paket keahlian tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan DU/DI akan tenaga kerja. Ada paket-paket keahlian tertentu yang sedang diminati, dibuka di banyak SMK, dan menghasilkan banyak lulusan tetapi kurang terserap di pasar kerja karena pekerjaan yang relevan tidak banyak atau mulai mengalami kejenuhan. Ketiga, perkembangan SMK dan penyediaan paket keahlian masih belum berorientasi pada potensi ekonomi dan keunggulan lokal. Keempat, perkembangan SMK dan penyediaan paket keahlian masih belum dilakukan berdasarkan data proyeksi tentang peluang bisnis dan investasi di masa depan.

Berbagai kegiatan sudah dilakukan untuk menyelaraskan Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan DU/DI umumnya dapat dikategorikan menjadi: (i) pengembangan/pemetaan kompetensi; (ii) pelaksanaan pembelajaran; dan (iii) evaluasi hasil pembelajaran (Samsudi, 2005). Jenis kegiatan yang paling sering dilakukan diantaranya adalah Praktik Kerja Industri (Prakerin), sinkronisasi dan validasi kurikulum, guru tamu dari DU/DI serta uji kompetensi. Upaya penyelarasan juga telah diintegrasikan dalam instrumen akreditasi SMK yaitu dalam penilaian terkait standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana serta standar pengelolaan. Untuk mendukung penyelarasan proses pembelajaran di SMK dengan DU/DI, Direktorat Pembinaan SMK telah mengambil langkah strategis pada tahun 2015 dengan membentuk sub-direktorat baru yaitu Sub Direktorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri⁴. Hal ini diharapkan akan meningkatkan keterlibatan publik dalam pengembangan SMK (Renstra Direktorat PSMK 2015 – 2016). Sebelum pembentukan Sub Direktorat baru ini, Direktorat Pembinaan SMK juga telah meluncurkan berbagai kegiatan dan pembiayaan untuk memperkuat kerjasama SMK dengan DU/DI melalui Sub Direktorat Pembelajaran.

Sejumlah laporan menunjukkan berbagai keberhasilan kemitraan SMK dengan DU/DI. Akan tetapi, keberhasilan tersebut masih berskala kecil, pada tingkat lokal serta berkembang secara unik sesuai dengan inisiatif SMK serta DU/DI yang menjadi mitra. Faktor-faktor lain yang juga berpengaruh antara lain: status SMK (negeri atau swasta), peluang dan perkembangan ekonomi lokal, ketersediaan sumberdaya manusia terutama kemampuan dan komitmen Manajemen Sekolah untuk menjadi ‘pelopor perubahan’ yang berorientasi pada

² Relevansi berkaitan dengan rasio antara kompetensi lulusan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif atau relevansi bisa diketahui juga dengan melihat pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh lulusan dengan kompetensi yang dipelajarinya semasa bersekolah.

³ Data BPS tentang ‘Angka Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2004 – 2014’ menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka SMK pada bulan Agustus 2014 mencapai 12,65 persen.

⁴ Sub Direktorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri memiliki dua seksi: (i) Seksi Penyelarasan Kejuruan dan (ii) Seksi Kerjasama Industri

pemecahan masalah. Berbagai faktor tersebut menciptakan kondisi yang berbeda bagi tiap SMK sehingga sulit untuk menentukan satu pendekatan penguatan kemitraan SMK – DU/DI yang cocok bagi semua. Apalagi hingga saat ini, dukungan luas dan sistematis dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendorong keterlibatan DU/DI dalam pengembangan Pendidikan Kejuruan belum optimal. Upaya-upaya pemerintah yang ada masih bersifat sebagai pelengkap saja yang memudahkan SMK untuk bermitra dengan DU/DI terutama jika inisiatif kuat sudah ada dari manajemen sekolah (Suliswanto, 2012 dan SED TVET 2012).

Penyusunan Kurikulum SMK bersama DU/DI

Penyusunan kurikulum SMK bersama dengan DU/DI ini merupakan salah satu bentuk kemitraan yang mencetak sejumlah cerita sukses. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan pengembangan kurikulum dilakukan oleh Tingkat Satuan Pendidikan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengorientasikan pendidikan dengan kebutuhan konteks lokal dari masing-masing daerah dimana Satuan Tingkat Pendidikan tersebut berada. Namun demikian, pemerintah pusat juga tetap memberikan standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Gagasan ini kemudian dioperasionalisasikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Pasal 16 PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa kurikulum dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan berpedoman pada pedoman Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, yang dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah.

Sejak tahun 2010 SMK YPT Kota Tegal menerapkan apa yang mereka sebut sebagai ‘Kurikulum Terintegrasi’ yang merupakan hasil perpaduan antara kurikulum nasional dan kurikulum industri yang dirancang oleh PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Kesepakatan penerapan kurikulum ini langsung ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan juga berlaku bagi SMK-SMK lain di Jawa Tengah yang memiliki jurusan otomotif dan teknik kendaraan ringan. Kurikulum Terintegrasi ini dirancang bersama oleh guru-guru SMK dengan industri otomotif and berhasil menyelaraskan kurikulum nasional dengan kebutuhan industri. Belajar dari keberhasilan di Jawa Tengah, kerjasama SMK dengan PT. Astra Daihatsu Motor kemudian dikembangkan juga di berbagai provinsi lain seperti Jawa barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Cerita sukses lain tentang bagaimana DU/DI membina SMK ditunjukkan oleh kegiatan Cisco Academy yang merupakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Cisco System Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang jaringan dan komunikasi teknologi ini membantu sejumlah SMK untuk mengintegrasikan kurikulum yang disusun oleh Cisco System dengan kurikulum nasional. Hingga pada tahun 2016 terdapat 38 SMK yang aktif bekerjasama dengan Cisco Academy untuk melakukan pengkinian kurikulum dan melakukan berbagai pengembangan kapasitas, termasuk dalam pelatihan guru.

Inisiatif DU/DI untuk mengembangkan SMK yang mampu mencetak lulusan sesuai kebutuhan industri juga ditunjukkan oleh pembangunan SMK Mitra Industri pada tahun 2011 oleh Yayasan Mitra Industri Mandiri di Bekasi. Kawasan Industri MM 2100 menjadi salah satu pengelolanya. SMK Mitra Industri dibentuk selaras dengan harapan DU/DI termasuk dalam hal pembangunan karakter siswa. Jurusan juga dibuat sesuai permintaan perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut. Dari 208 lulusan angkatan pertama, 186 (89%) langsung diterima di berbagai perusahaan. Selebihnya ada yang berwirausaha, lanjut kuliah atau berangkat ke Jepang.

2.3. MUTU PESERTA DIDIK

Mutu lulusan SMK secara ideal ditentukan berdasarkan penguasaan atas suatu standar kompetensi kerja (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Berdasarkan standar kompetensi tersebut, dirumuskan suatu sistem pengujian dan sertifikasi. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum semua program keahlian di SMK telah tersedia SKKNI-nya dan beberapa SKKNI yang sudah ada belum direfleksikan dalam kurikulum SMK.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meminimalisasi kesenjangan kompetensi kerja lulusan SMK dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri antara lain melalui penyusunan skema sertifikasi bagi lulusan SMK dengan melibatkan asosiasi profesi dan DU/DI maupun pelaksanaan uji kompetensi.

Dalam rangka membekali lulusan SMK dengan sertifikat kompetensi yang diakui dunia usaha/dunia industri sehingga lulusan SMK tersebut memiliki daya saing yang tinggi, maka sejak tahun 2015 Dit. Pembinaan SMK, Kemdikbud dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah melaksanakan kegiatan pengembangan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP- P1). Adapun lingkup kegiatan pengembangan SMK menjadi LSP-P1 terdiri dari: (i) fasilitasi persiapan dan pelatihan asesor kompetensi; (ii) penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK); (iii) penyiapan materi uji kompetensi; serta (iv) pelatihan penyusunan dan penerapan dokumen mutu. Nantinya setiap calon lulusan SMK akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan di LSP-P1 di sekolah masing-masing atau pada LSP-P1 SMK terdekat. Jika lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya. Pembentukan LSP-P1 dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pendekatan area: jika di suatu wilayah terdapat beberapa SMK yang belum memiliki LSP-P1 maka akan dikembangkan satu LSP-P1 yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh semua SMK yang ada di wilayah tersebut;
- b. Pembentukan LSP-P1 difokuskan pada sekolah yang memiliki siswa >600: saat ini SMK yang memiliki siswa >600 ada sekitar 4.000 SMK, dengan jumlah total siswa sebesar 90% total dari jumlah siswa SMK seluruh Indonesia;

Nantinya jika pembentukan LSP-P1 sudah memenuhi kebutuhan maka Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dapat digantikan dengan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP-P1, dimana biaya sertifikasi akan disubsidi pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sampai dengan tahun 2015 pelaksanaan uji sertifikasi diprioritaskan pada 13 program keahlian (dengan 8 program keahlian diantaranya masuk dalam 12 sektor prioritas MEA), yaitu: Kepariwisata, Tata Boga, Tata Kecantikan, Tata Busana, Keuangan, Administrasi, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Komputer dan Informatika, dan Teknik Telekomunikasi.

Sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan sertifikasi lulusan SMK

Pada bulan Maret 2016, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud telah melakukan kerja sama dengan Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR dalam rangka penyiapan sistem sertifikasi bidang teknik bangunan (konstruksi) dengan mengacu pada sistem yang dikembangkan oleh BNSP. Dengan adanya sertifikasi tersebut diharapkan lulusan SMK menjadi lebih kompeten dan memenuhi kebutuhan dunia usaha/dunia industri konstruksi. Kerjasama tersebut diikuti dengan pengesahan skema sertifikasi bagi siswa SMK, nantinya skema tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum SMK bidang teknik bangunan (konstruksi). Penyusunan skema sertifikasi bidang konstruksi bagi SMK tersebut dilakukan sejak akhir tahun 2015 dan sampai dengan saat ini telah berhasil disusun sembilan skema sertifikasi yang terdiri dari lima skema dalam bentuk okupasi dan empat skema dalam bentuk kualifikasi (sumber:<http://www.pu.go.id/berita/11049/Bina-Konstruksi-Akan-Tingkatkan-Kompetensi-Lulusan-SMK-Melalui-Sertifikasi>). Selain itu, Kementerian PUPR juga akan memfasilitasi penyiapan assessor bidang konstruksi serta pelaksanaan on the job training bagi guru SMK bidang konstruksi di proyek-proyek infrastruktur. Selain itu Kemdikbud juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan sertifikasi bagi lulusan SMK Kelautan dan Perikanan. Saat ini terdapat 145 SMK bidang Perikanan dan 170 SMK bidang Kelautan dengan jumlah peserta didik sekitar 40.000 anak, dengan persyaratan setiap pembukaan bidang keahlian kelautan dan perikanan harus bekerja sama dengan dunia usaha/industri.

2.4. MUTU GURU SMK

Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan yang berkualitas harus mampu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kebutuhan tenaga kerja. Guru sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di sekolah memiliki tanggung jawab untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang cepat dan tuntutan standar yang makin tinggi.

Secara umum, kurangnya guru yang berkualitas, distribusi guru yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia, serta belum terpenuhinya kebutuhan guru produktif merupakan beberapa tantangan utama terkait guru di SMK saat ini. Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan mutu guru di Pendidikan Kejuruan juga terkait dengan beberapa hal: Pertama, masih terdapat guru SMK belum memenuhi kualifikasi akademik seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru. Menurut kedua peraturan tersebut kualifikasi akademik bagi guru adalah S1 atau D-IV. Akan tetapi pada tahun 2015, sekitar 12 % dari guru SMK masih memiliki kualifikasi akademik dibawah S1/ D-IV. Proporsi ini lebih besar dari pada guru SMA yang juga berkualifikasi akademik dibawah S1/D-IV (7%). Kedua, masih banyak keraguan terhadap kompetensi guru SMK karena hasil uji kompetensi menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu guru tidak selalu memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Ketiga, masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pembelajaran di SMK yang mengutamakan penguasaan kompetensi membutuhkan para pendidik yang memahami perkembangan usaha dan industri di luar sekolah. Oleh sebab itu, pengalaman para guru SMK untuk terjun langsung dalam kegiatan di industri menjadi sangat penting. Apalagi magang di DU/DI merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk pengkinian kompetensi. Magang guru di perusahaan juga dapat menguatkan kerjasama SMK yang bersangkutan dengan DU/DI untuk kegiatan Prakerin siswa. Kerjasama SMK dan DU/DI dalam bentuk magang guru telah terintegrasikan dalam instrumen akreditasi SMK (dalam Standar Pengelolaan), akan tetapi data tentang pengalaman industri guru SMK belum tersedia secara sistematis. Data ini dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan pembinaan guru agar lebih mampu mentransfer informasi serta keterampilan sesuai perkembangan teknologi terbaru di perusahaan-perusahaan. Secara umum, SMK harus mengambil inisiatif untuk membuka peluang magang guru di perusahaan. Minat dari DU/DI masih belum optimal untuk mengembangkan kegiatan magang guru SMK menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk perusahaan. Sekalipun ada kesadaran untuk menjadikan magang guru di perusahaan sebagai kegiatan yang terstruktur, manajemen sekolah tidak selalu mampu melaksanakannya. Kendala utama dalam pelaksanaan program magang tersebut adalah masih terbatasnya peluang magang di DU/DI. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi tidak berkala serta tergantung pada informasi dari DU/DI atau inisiatif guru.

Pelatihan dan Magang Guru SMK di Perusahaan

Hingga tahun 2016, SMKN 1 Singosari Kabupaten Malang memiliki lebih dari 200 industri rekanan. Salah satunya adalah dengan PT Trakindo Utama. Kerjasama ini membuka peluang untuk pelatihan dan magang di industri bagi siswa maupun guru. Dengan pelatihan dan magang tersebut, guru-guru SMKN 1 Singosari dapat meningkatkan kompetensi dan terpapar oleh pengalaman terjun langsung di industri. Peningkatan kualitas Pendidikan Kejuruan melalui pelatihan siswa dan guru juga terjadi pada program Toyota – Technical Education Program (T-TEP). Program ini diluncurkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1991 dan merupakan program kerjasama antara Toyota Motor Cooperation (TMC), PT Toyota Astra Motor, dealer resmi Toyota, dan pemerintah.

Hingga 2016, sudah terdapat 62 SMK pelaksana program T-TEP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Toyota berupaya untuk menambah lima institusi T-TEP setiap tahunnya. Untuk meningkatkan proses belajar-mengajar di sekolah yang menjadi institusi T-TEP, Toyota memberikan beberapa fasilitas antara lain: training manual, pengembangan kurikulum baru, pelatihan untuk guru buku panduan Technical Toyota, kesempatan untuk melakukan pelatihan kerja di Toyota serta fasilitas alat peraga berupa kendaraan Toyota. T-TEP merupakan contoh inisiatif DU/DI yang bisa menjembatani kepentingan institusi pendidikan dan industri otomotif sehingga guru dan siswa mampu terus ter-update dalam penguasaan teknologi.

2.5. MUTU SATUAN PENDIDIKAN

Penjaminan mutu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu satuan atau program pendidikan agar dapat memenuhi standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan. Saat ini penjaminan mutu satuan atau program Pendidikan Kejuruan dilaksanakan dengan menggunakan sistem akreditasi. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 yang menyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan dan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. Selanjutnya, Permendiknas no.63/2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar mutu pendidikan di atas SNP. Instrumen akreditasi terbaru SMK yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) merujuk pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)⁵. Berdasarkan data hasil akreditasi pada satuan dan program pendidikan SMK yang telah dilakukan oleh BAN-S/M, sampai dengan akhir tahun 2015 dari 13.131 SMK saat ini sudah 6.120 SMK terakreditasi dengan rincian sejumlah 23% terakreditasi A, 19% terakreditasi B dan 4.5% terakreditasi C (Tabel 2.1).

TABEL 2.1. Rekapitulasi Peringkat Akreditasi SMK)*
Sumber: <http://bansm.or.id/akreditasi/rekapitulasi>

Jenjang Pendidikan	Peringkat Akreditasi			
	A	B	C	TT
SMK	3.042	2.488	590	71

Keterangan:

Nilai akreditasi berkisar antara 0-400, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Akreditasi A = 361 - 400
- b. Akreditasi B = 301 - 360
- c. Akreditasi C = 201 - 300

Untuk hasil akreditasi dengan nilai dibawah 201 dianggap tidak terakreditasi (TT).

Secara umum, sekolah telah memahami pentingnya akreditasi untuk menumbuhkan kesadaran warga sekolah untuk meningkatkan kinerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui bahwa hasil akreditasi ternyata belum menjamin mutu suatu satuan atau program pendidikan. Proses akreditasi lebih banyak dilihat dan dititikberatkan pada pemenuhan kelengkapan dokumen (pembuatan bukti-bukti fisik) dari pada proses peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara berkelanjutan. Dalam hal ini proses akreditasi belum secara optimal berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu satuan atau program pendidikan. Peringkat akreditasi yang diperoleh satuan atau program pendidikan lebih dimanfaatkan untuk menarik minat masyarakat, terutama calon siswa dan orang tua untuk mengirim anaknya bersekolah di SMK yang bersangkutan.

Selain sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh BAN-S/M, saat ini satuan pendidikan juga tertarik untuk menerapkan standar mutu yang diterbitkan pihak lain. Sejumlah SMK juga mengimplementasikan ISO 9001:2008 yang merupakan standar internasional tentang sistem manajemen mutu. Namun demikian upaya ini tidak selalu dinilai positif, satuan pendidikan dinilai hanya mencukupkan diri agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan ISO sampai mendapat sertifikat. Upaya peningkatan mutu produk secara efektif dan terus-menerus seperti harapan konsumen justru tidak selalu terpenuhi. Selain itu biaya untuk melaksanakan

⁵ Permendiknas no. 63/2009 pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa standar mutu pendidikan di atas SNP dapat berupa: standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal atau standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu,

ISO 9001 hingga mendapatkan sertifikasi, pemantauan serta re-sertifikasi relatif besar, hal ini seringkali menjadi beban keuangan bagi satuan pendidikan.

Sebagai suatu subsistem pendidikan yang dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI, selayaknya penilaian mutu SMK juga mengacu pada standar. Oleh sebab itu, cara lain yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan penjaminan mutu SMK adalah dengan mengukur kepuasan konsumen terhadap lulusan SMK.

Penerapan Sertifikasi ISO 9001:2001 di SMK

Sejak tahun 2005 berkaitan dengan pelaksanaan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) beberapa SMK telah mendapatkan sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*) 9001: 2001 sebagai bentuk penerapan manajemen mutu dalam pengelolaan pendidikannya, pada waktu itu Kemdiknas mencanangkan target pada tahun 2014 seluruh SMK sudah memiliki sertifikasi ini. Meskipun pelaksanaan program RSBI pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 8 Januari 2013, sampai dengan saat ini beberapa SMK masih berupaya mendapatkan sertifikasi/melakukan sertifikasi ulang ISO 9001 tersebut (sertifikasi ISO berlaku selama 3 tahun).

Sebagai standar mutu internasional, implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 secara konsisten diharapkan akan meningkatkan mutu sekolah serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Selain itu, sekolah akan mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat sebagai sekolah berkualitas internasional atau memiliki citra yang lebih baik dibanding sekolah lainnya. Hal ini tentunya akan meningkatkan kemampuan sekolah dalam memancing minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada sekolah tersebut.

Contoh beberapa manfaat yang dapat diperoleh institusi pendidikan yang menerapkan standar ISO 9001:

- Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 akan membuat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung nyaman, terarah, dan dapat diterima. Dokumentasi juga meningkatkan pengertian antar pengajar dan staf dan dapat digunakan untuk melatih staf baru;
- Operasional institusi pendidikan lebih efisien, masalah mutu dapat diidentifikasi, diperbaiki, dan dicegah, dan kegiatan perbaikan dapat dilakukan secara sistematis;
- Audit mutu internal memungkinkan setiap pengajar dan staf untuk mengemukakan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Di sisi lain, siswa dan pihak terkait lainnya dapat memanfaatkan proses formal yang ada untuk memberikan tanggapan terhadap proses pelayanan yang berjalan;
- Sistem manajemen mutu memberikan penjabaran yang jelas terhadap hak dan kewajiban siswa, pengajar, maupun staf;
- Audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi independen menghadirkan perspektif eksternal yang lebih objektif. Hal ini membuka peluang adanya peningkatan mutu. Beberapa hal yang mungkin diidentifikasi dalam proses audit eksternal yaitu kekuatan, kelemahan, dan beberapa potensi untuk perbaikan yang belum dijalankan;
- Peningkatan mutu pelayanan yang diberikan SMK sehingga dapat memuaskan pelanggan, baik pelanggan internal (guru dan tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri).

Visi Pendidikan Kejuruan Indonesia 2030

3.1. BERSIAP MENUJU INDONESIA 2030

Pertumbuhan ekonomi Indonesia makin tinggi. Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2030 menunjukkan gambaran yang positif. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi makro Indonesia dianggap relatif stabil. Pada tahun 2030, Indonesia bahkan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar di dunia ke tujuh setelah Cina, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Kebangkitan Asia yang utamanya didorong oleh transformasi ekonomi di India dan Cina membuka peluang pasar yang besar untuk berbagai komoditas dari Indonesia. Di dalam negeri, titik pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kota-kota besar dan menengah. Pada tahun 2030, diperkirakan 71% penduduk Indonesia berada di perkotaan dan menyumbang 86% Produk Domestik Bruto (PDB). Kekuatan pertumbuhan ekonomi akan banyak didorong oleh besarnya konsumsi dalam negeri. Kelas menengah akan makin besar dan berperan lebih penting baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai konsumen. Pada tahun 2030 kelompok konsumen Indonesia diperkirakan akan menjadi 113 juta orang. Ini membuat tumbuhnya peluang bisnis pada sektor layanan konsumen. Pertumbuhan pesat diperkirakan akan terjadi pada sub-sektor layanan jasa keuangan. Indonesia juga akan menjadi pelaku ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Penggunaan internet, telepon seluler, dan sosial media akan mengubah berbagai aspek kegiatan ekonomi. Peningkatan transaksi bisnis daring (*e-commerce*) yang sangat tajam diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020 saat kelas menengah Indonesia berjumlah dua kali lipat dibandingkan tahun 2010 – 2011. Pertumbuhan tersebut dapat berlanjut karena Indonesia akan memiliki populasi penduduk yang didominasi angkatan muda dan produktif. Berbeda dengan berbagai negara maju termasuk Jepang yang telah mengalami penuaan populasi, penduduk muda Indonesia masih terus tumbuh hingga sekitar tahun 2025. Populasi muda dan produktif ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 2,4% per tahun hingga tahun 2030. Selain itu produktivitas pekerja Indonesia juga meningkat terutama di sektor perdagangan, transportasi, dan telekomunikasi (*McKinsey 2012; <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/>*)

Kondisi infrastruktur Indonesia makin baik. Pada tahun 2018-2019, diharapkan Indonesia mulai dapat menyaksikan dan menikmati manfaat selesainya berbagai proyek infrastruktur. Dengan pembangunan jalur kereta api dan kereta api cepat, Mass Rapid Transit (MRT), jalan tol, perbaikan puluhan bandara kecil di daerah-daerah terpencil sehingga setidaknya dapat didarati oleh pesawat Boeing tipe 737, pembenahan di sejumlah pelabuhan, dan lain-lain, akan membuka akses ke transportasi yang lebih mudah serta murah dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Akses internet pun diharapkan membaik karena pembangunan fasilitas internet berkecepatan tinggi atau pita lebar. Dalam Rencana Pita Lebar (RPL), pemerintah menargetkan sebanyak 135 kota dan kabupaten sudah terkoneksi pada tahun 2019. Tersedianya infrastruktur ini menyebabkan lalu-lintas data makin merata dan cepat. Di bidang perbankan misalnya, satelit milik Bank BRI (BRISat) yang direncanakan akan diluncurkan tahun 2016 akan dapat membuat kinerja perbankan menjadi lebih efisien. Satelit ini diperkirakan akan bisa memangkas pengeluaran komunikasi antar badan pegawai dan pelanggan di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia hingga 50%. Saat pembangunan infrastruktur gas di Indonesia timur dan pembangunan proyek penyediaan listrik 35.000 megawatt selesai, diharapkan penggunaan gas akan lebih merata dan pasokan listrik pun meningkat tajam.

Kebutuhan akan tenaga kerja terampil makin besar. Pada tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan menghadapi kenaikan kebutuhan tenaga kerja terampil sebanyak 60 juta orang yaitu dari 55 juta orang pada tahun 2012 menjadi 113 juta orang di tahun 2030. Jika kebutuhan ini dikaitkan dengan prioritas pemerintah maka ada

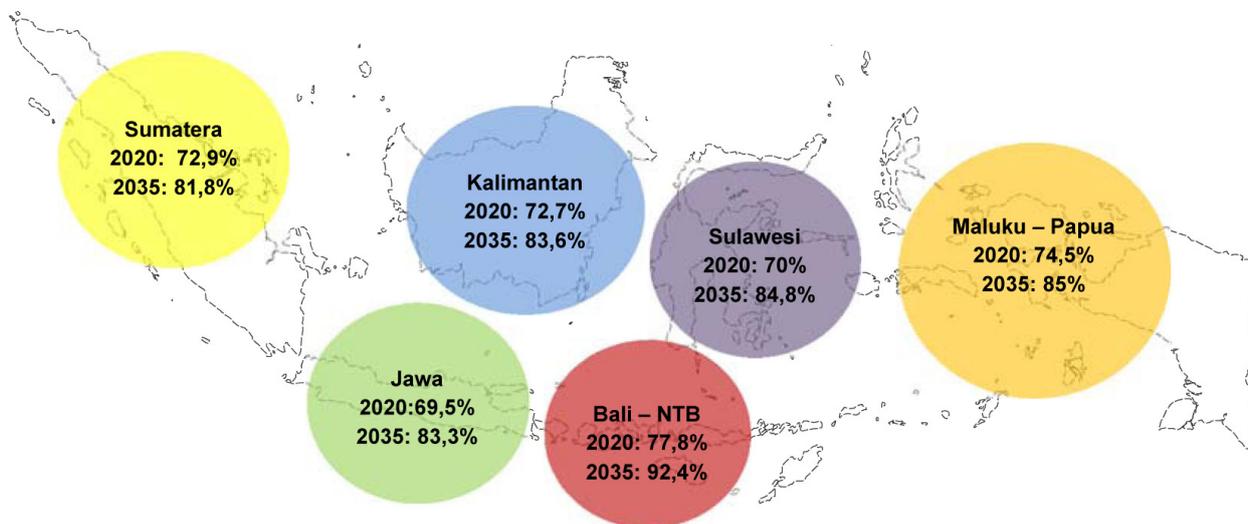
beberapa sektor yang seharusnya menjadi orientasi utama bagi perencanaan ketenagakerjaan, antara lain: sektor perikanan dan kemaritiman, sektor pertanian dan sektor pariwisata. Jika pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan berbagai infrastruktur dipertimbangkan, maka kebutuhan tenaga kerja di pada periode 15 tahun mendatang juga akan muncul dari di bidang teknologi rekayasa, konstruksi, dan transportasi. Era digital yang telah berlangsung juga akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja.

Menurut proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor industri yang disusun oleh Kementerian Perindustrian (2015), sampai dengan tahun 2020 komposisi kebutuhan tenaga kerja menurut subsektor industri diperkirakan relatif stabil. Kebutuhan tenaga kerja dari sub-sektor makanan akan mencapai 29% dari seluruh kebutuhan tenaga kerja sektor industri bukan migas. Kebutuhan sub-sektor garmen akan mencapai 15,5% dan sub-sektor industri kayu dan barang kayu mencapai 10% dari total kebutuhan tenaga kerja industri. Kebutuhan tenaga kerja sektor industri di Jawa secara umum cenderung menurun (dari 432 ribu pada tahun 2015 menjadi 424 ribu pada tahun 2020 menjadi 386 ribu pada tahun 2035). Sebaliknya, kebutuhan tenaga kerja sektor industri di provinsi-provinsi lain di luar Jawa justru meningkat.

Pada tahun 2020 dibutuhkan 429 ribu tenaga kerja lulusan SMK dan pada tahun 2035 dibutuhkan 634 ribu tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja berpendidikan SMK terutama berasal dari sub-sektor industri makanan, industri garmen, serta industri kayu dan pembuatan barang dari kayu.

GAMBAR 2.1. Proyeksi komposisi jumlah kebutuhan tenaga kerja sektor industri jenjang pendidikan SMK per wilayah pada tahun 2035

Sumber: *Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Industri, Kemenperin (2015)*



Penjelasan:

Data ini menggambarkan proyeksi persentase kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMK (Level 2 KKNI) per wilayah, sebagai contoh untuk wilayah Sumatera pada tahun 2035 diprediksikan akan dibutuhkan sejumlah 81.8% lulusan SMK dari total 100% kebutuhan tenaga kerja saat itu.

GAMBAR 3.1. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Sektor Industri Per Wilayah (orang)

Sumber: Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Industri, Kemenperin (2015), diolah.

Wilayah	Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Jenjang Pendidikan SMK (Orang)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata periode:		
							2021-25	2026-30	2031-35
Sumatera	73,372	78,455	81,285	91,325	98,454	100,362	141,059	127,792	152,817
Jawa	432,225	428,686	438,625	436,278	438,953	423,975	407,646	443,323	401,461
Kalimantan	11,135	16,971	17,640	20,396	22,308	22,981	32,089	42,709	57,838
Sulawesi	18,236	24,212	25,183	29,276	32,104	33,135	46,114	69,617	96,684
Maluku dan Papua	808	2,369	2,438	2,566	2,670	2,651	7,711	9,489	13,219
Bali dan Nusa Tenggara	23,585	23,672	24,277	24,727	25,243	24,673	25,081	35,363	40,087
Indonesia	559,361	574,365	589,448	604,568	619,732	607,777	659,700	728,293	762,106

Keterangan: Kebutuhan tenaga kerja pada tabel ini adalah selisih antara jumlah pekerja pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah pekerja tahun sebelumnya

TABEL 3.2. Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK

Sumber: Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud (2016)

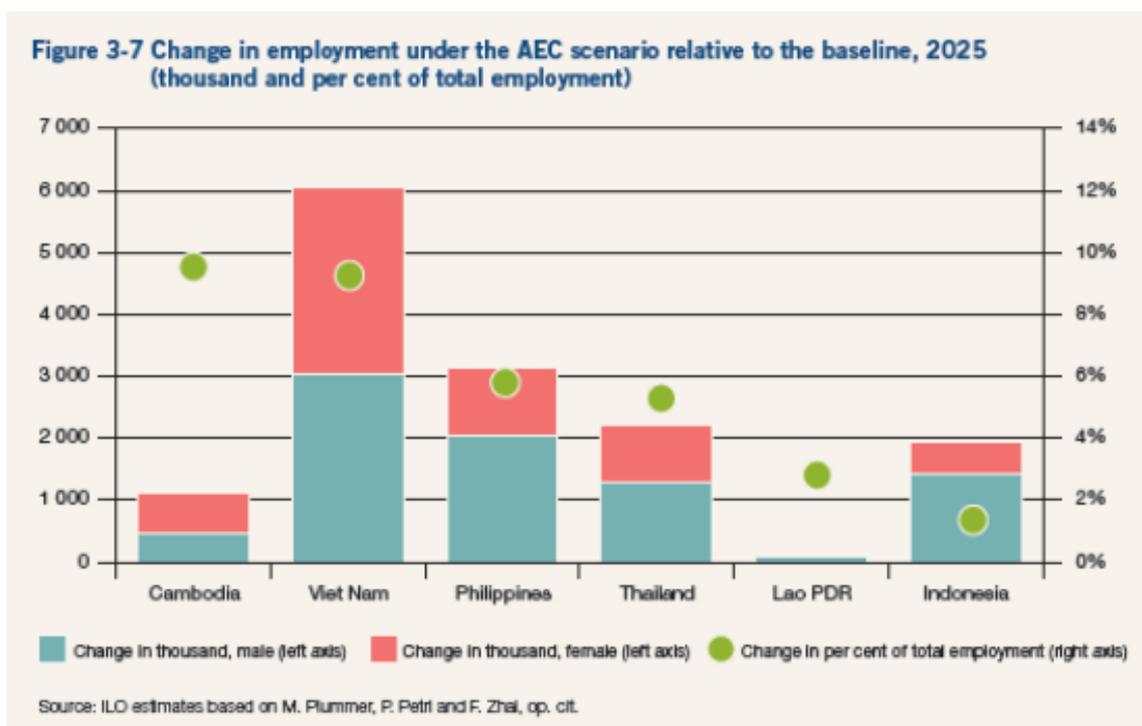
No.	Bidang Keahlian	Lulusan SMK 2016	Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja (Hingga 2016)	Surplus (+)/ Minus (-) lulusan SMK
1	Teknologi dan Rekayasa	445,047	638,652	193,605 (-)
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	277,545	327,813	50,268 (-)
3	Kesehatan	60,944	68,245	7,301 (-)
4	Agribisnis dan Agroteknologi	52,319	445,792	393,473 (-)
5	Perikanan dan Kelautan	17,249	3,364,297	3,347,048 (-)
6	Bisnis dan Manajemen	348,954	119,255	229,699 (+)
7	Pariwisata	82,171	707,600	625,429 (-)
8	Seni Rupa dan Kriya	10,017	81,833	71,816 (-)
9	Seni Pertunjukan	2,000	6,3000	4,3000 (-)
TOTAL		1,296,246	5,759,787	4,463,541 (-)

Terciptanya berbagai peluang kerja untuk tenaga terampil terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berbagai perubahan sosial-ekonomi di Indonesia hingga 2030 harus ditempatkan pada konteks regional (ASEAN) dan global. Berlakunya integrasi ekonomi kawasan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan konteks regional yang perlu diperhitungkan. MEA memiliki berbagai implikasi terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia. Perubahan-perubahan struktural terkait MEA akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pekerja terampil serta menurunkan kebutuhan pekerja tidak terampil. MEA diharapkan akan menjadi pendorong bagi perekonomian yang padat keterampilan (*skill intensive economies*) karena banyak anggota ASEAN telah bergerak menuju produksi dan ekspor yang pengerjaan serta teknologinya membutuhkan keterampilan dan produktivitas yang tinggi. Diperkirakan pada tahun 2010 hingga 2025,

GAMBAR 3.3. Peningkatan peluang kerja terkait MEA

Sumber: ASEAN Community 2015: Managing integration for better jobs and shared poverty, ILO, 2014



permintaan akan pekerja terampil di kawasan ASEAN akan naik sekitar 41% atau sekitar 14 juta orang. Separuh dari angka tersebut merupakan kebutuhan Indonesia dan disusul oleh Filipina dengan kebutuhan pekerja terampil sebesar 4,4 juta orang. Sesuai skenario MEA, pada tahun 2025 di Indonesia akan terjadi kenaikan peluang kerja sebanyak 1,9 juta (sekitar 1,3 % dari total lapangan kerja). Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa pemenuhan kebutuhan pekerja terampil itu tidak akan terjadi secara otomatis. Penyediaan tenaga kerja terampil harus dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. Dalam peningkatan kualitas tersebut, harus dipastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan (terutama yang berusia muda) mencapai kualifikasi dan memperoleh kompetensi yang dapat membekali mereka untuk bersaing dalam mengisi peluang-peluang kerja yang ada (ILO, 2014).

3.2. PROFIL LULUSAN PENDIDIKAN KEJURUAN TAHUN 2030

Lulusan SMK merupakan salah satu duta utama dari pendidikan menengah kejuruan. Sejauh mana lulusan SMK terserap di pasar kerja serta berprestasi di masyarakat menunjukkan kinerja, relevansi serta mutu Pendidikan Kejuruan. Arah pembangunan Pendidikan Kejuruan perlu mengacu pada profil lulusan SMK yang hendak dihasilkan. Di bidang pendidikan menengah kejuruan dan vokasi, profil lulusan dikaitkan dengan kompetensi. Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah memberi kriteria tentang kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan penjenjangan kualifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menyebutkan bahwa lulusan SMK berada pada level operator (level 2).

Dua peraturan tersebut merupakan acuan utama untuk mengembangkan profil lulusan SMK di tahun 2030. Hal lain yang perlu menjadi acuan tentang lulusan SMK yang hendak dihasilkan dalam periode 15 tahun ke depan adalah dinamika sosial, politik, dan ekonomi baik pada level nasional, regional maupun global.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia – Level 2 (Setara dengan lulusan SMU/ SMK) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- Mampu melaksanakan **satu tugas spesifik**, dengan menggunakan **alat**, dan **informasi**, dan **prosedur kerja** yang lazim dilakukan serta menunjukkan **kinerja dengan mutu yang terukur**, dibawah **pengawasan langsung atasannya**;
- Memiliki **pengetahuan operasional dasar** dan **pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik**, sehingga mampu **memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah** yang lazim timbul;
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

Kompetensi Lulusan SMA/ MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

- **Sikap:** Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- **Pengetahuan:** Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
- **Keterampilan:** Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Perkembangan bisnis, kecanggihan teknologi, struktur kerja baru serta berbagai perubahan yang sulit diprediksi akan menentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 (21st Century Skills) yang pada pokoknya dapat dikategorikan pada empat kelompok besar yaitu:

- Keterampilan yang terkait cara berfikir (misalnya: kreativitas dan inovasi, berfikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, belajar untuk belajar/ metakognitif).
- Keterampilan yang terkait dengan cara kerja (misalnya: komunikasi dan kerjasama).
- Keterampilan yang dapat digunakan sebagai instrumen kerja (pengumpulan informasi/ data, menggunakan perangkat teknologi informasi dan media).
- Keterampilan yang terkait dengan kemampuan untuk berfungsi baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat (integritas, disiplin, tanggungjawab, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan lain-lain).

‘Keterampilan Abad 21’ tersebut merupakan keterampilan yang bisa diterapkan dan bermanfaat atau *transferable* di berbagai bidang dan di berbagai level. Pentingnya keterampilan abad 21 bagi pendidikan sudah diakui, namun tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikannya dalam kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi/ penilaian. Sebagai contoh, praktik di negara-negara ASEAN menunjukkan beragam pemikiran, kebijakan dan cara mengintegrasikan dalam Pendidikan Kejuruan (Suto, 2013; SEAMEO VOCTECH, 2014; *The Economist Intelligence Unit Limited*, 2015).

Profil Lulusan SMK dan Keterampilan Abad 21 yang relevan

Dengan mempertimbangkan dua referensi hukum (penjenjangan KKNI dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah) serta berbagai tren kebutuhan di masa depan seperti yang telah dijelaskan diatas, pada tahun 2030 SMK perlu menghasilkan lulusan yang:

Memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan dan diakui oleh dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) serta menguasai keterampilan abad 21 yang relevan:

Keterampilan abad 21 bagi lulusan SMK:

- Memiliki cara berfikir kritis, kreatif, inovatif dan berorientasi pada pemecahan masalah.
- Memiliki cara yang kerja komunikatif dan bisa bekerja sama.
- Mampu melakukan pengumpulan informasi/ data serta menggunakan perangkat teknologi informasi dan media.
- Memiliki integritas dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas dan mengemban kewajiban terkait profesinya.

3.3. PENYIAPAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN INDONESIA UNTUK KEBUTUHAN 2030

3.3.1. Ketersediaan bidang studi dan kebutuhan di Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi kondisi Indonesia serta profil lulusan SMK yang diharapkan pada tahun 2030 akan mempengaruhi bagaimana Pendidikan Kejuruan Indonesia perlu disiapkan. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia baik yang direncanakan maupun yang terjadi akibat interaksi dari berbagai kondisi diluar perencanaan nasional dapat menjadi acuan bagi Pendidikan Kejuruan untuk melakukan berbagai penataan ulang pada kurikulum, proses pembelajaran, personil, sarana dan prasana, pengelolaan/ manajemen, dan kelembagaan.

Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019 menetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis⁶ melalui percepatan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang telah ada maupun yang berada di luar Jawa (Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan mengembangkan potensi dan keunggulan di bidang manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata. Pada pusat - pusat pertumbuhan tersebut akan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus serta 14 (empat belas) Kawasan Industri baru yang tentunya membutuhkan tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki kompetensi kerja yang sesuai.

TABEL 3.4. Indikasi Lokasi dan Sektor Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2015 - 2019

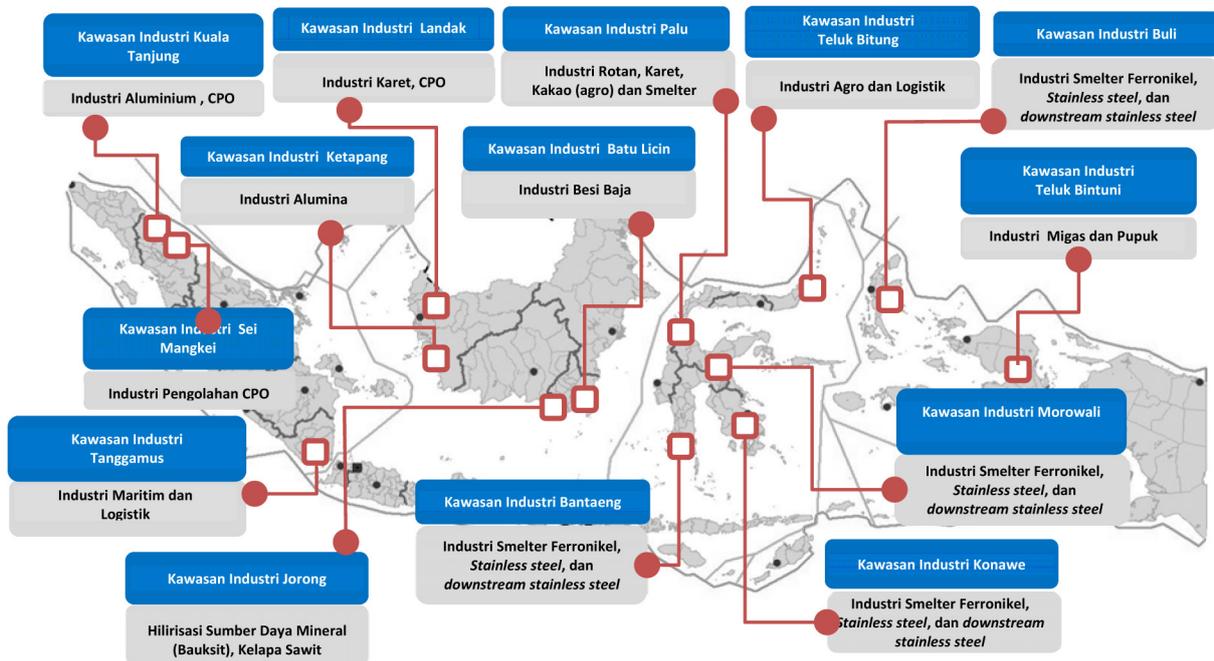
Sumber: Dokumen RPJMN 2015 – 2019, diolah

No	Lokasi	Sektor bisnis yang dikembangkan
1	Sorong, Papua Barat	Pengolahan hasil laut dan industri pengilangan
2	Teluk Bintuni, Papua Barat	Industri pupuk dan petrokimia
3	Merauke, Papua	Industri makanan dan energi
4	Garobong, Kab Baru, Sulsel	Kilang, Petrokimia, dan depo logistik energi
5	Tarakan, Kalimantan Utara	Industri Manufaktur
6	Batulicin, Kalsel	Industri pengilangan dan industri berbasis metal
7	Padang-Pariaman, Sumatera Barat	Industri agro berbasis Karet, Kakao, dan Kelapa Sawit
8	Lhokseumawe, Aceh	Industri manufaktur dan galangan kapal
9	Jawa Barat (Bandung dan Jabodetabek)	Industri teknologi tinggi, riset dan pengembangan, dan jasa pendidikan/ Kesehatan
10	Taka Bonerate, Selayar, Sulawesi Selatan	Industri Pariwisata berbasis Maritim
11	Raja Empat, Papua Barat	Industri Pariwisata berbasis Maritim

⁶ Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai 'penggerak utama pengembangan wilayah'.

GAMBAR 3.1. Sebaran 14 Kawasan Industri Prioritas Wilayah Luar Jawa 2015 – 2019

Sumber: Dokumen RPJMN 2015 – 2019, diolah



Selain itu, dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan 22 kegiatan utama serta enam koridor ekonominya juga dapat menjadi referensi pembangunan Pendidikan Kejuruan. Klaster industri atau kawasan ekonomi khusus berbasis sumber daya unggulan (komoditi) akan dikembangkan di tiap koridor tersebut. Setidaknya, enam koridor itu menunjukkan potensi ekonomi yang ada di tiap-tiap wilayah. Selain itu, koridor-koridor ekonomi juga mencerminkan fokus pembangunan Indonesia pada kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri. Saat ini, ketersediaan bidang studi dan paket keahlian di SMK yang tersebar di berbagai daerah belum sepenuhnya sesuai dengan berbagai unggulan di koridor-koridor ekonomi.

- Di koridor ekonomi Sumatera terbuka peluang pengembangan bidang studi agribisnis dan agroteknologi untuk meningkatkan beberapa komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit dan karet.
- Di koridor ekonomi Jawa fokus pada perindustrian serta informasi dan komunikasi sudah relatif sesuai dengan ketersediaan bidang studi teknologi dan rekayasa serta TIK.
- Di koridor ekonomi Bali dan NTT fokus pada pariwisata telah sesuai dengan ketersediaan bidang studi yang relevan sekalipun bidang studi agribisnis dan agroteknologi masih perlu dikembangkan agar bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil bidang peternakan dan perikanan.
- Di koridor ekonomi Kalimantan dibutuhkan pengembangan di bidang studi teknologi dan rekayasa khususnya pada kompetensi-kompetensi keahlian yang relevan dengan kegiatan pertambangan.
- Di koridor ekonomi Sulawesi terbuka peluang untuk pengembangan bidang studi agribisnis dan agroteknologi terutama kompetensi-kompetensi keahlian yang terkait dengan produksi tanaman pangan dan perikanan. Selain itu dibutuhkan juga pengembangan bidang studi teknologi dan rekayasa yang relevan dengan kegiatan pertambangan.
- Di koridor ekonomi Maluku dan Papua fokus pada pertanian pangan dan pertambangan membutuhkan pengembangan bidang studi agribisnis dan agroteknologi serta bidang studi teknologi dan rekayasa.

Di seluruh wilayah koridor ekonomi, ketersediaan bidang studi TIK cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa bidang studi tersebut saat ini cukup diminati. Sekalipun demikian, perlu ada evaluasi tentang potensi dan relevansi dari bidang studi TIK di berbagai wilayah agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Distribusi paket keahlian yang dibuka per wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.5. Distribusi Paket Keahlian SMK yang dibuka dan Potensi Pengembangan Ekonomi Per Wilayah

Sumber: Pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan (2015), diolah

No	Bidang Studi	Jumlah Paket Keahlian Per Bidang Studi yang dibuka per Wilayah						
		Sumatera	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua
1	Teknologi dan Rekayasa	1.256	3.437	173	253	440	41	51
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.380	3.976	278	326	621	76	67
3	Kesehatan	181	746	93	65	272	64	21
4	Pariwisata	276	958	205	69	147	9	15
5	Seni Pertunjukan	16	66	11	9	8	2	-
6	Seni Rupa dan Kriya	31	132	16	12	11	1	3
7	Perikanan dan Kelautan	114	139	71	48	135	60	25
8	Agribisnis dan Agroteknologi	399	427	150	201	244	72	52
9	Bisnis dan Manajemen	1.309	3.384	128	295	393	45	44
Jumlah		4,954	13,227	1,125	1,272	2,266	369	278
Pengembangan Industri dan Bisnis (RPJMN 2015 – 2019)		<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa sawit • Karet • Batubara • Besi baja • Petrokimia • Perkapalan • Logistik • Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Tekstil • Makanan & Minuman • ICT • Peralatan Transportasi • Alutsista Perkapalan • Jabodetabek Area • Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Peternakan • Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa sawit • Logistik • Perakayuan • Industri baja • Bauksit • Batubara • Migas 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Manufaktur • Pengolahan perikanan • Smelter Nikel • Industri Baja • Logistik • Agroindustri (kakao, karet, rumput laut, rotan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian pangan • Perikanan • Tembaga • Nikel • Migas • Petrokimia • Pariwisata • Logistik 	
Komoditi Unggulan di tiap Koridor Ekonomi MP3EI		<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa sawit • Karet • Batubara • Besi baja • Perkapalan • KSN Selat Sunda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tekstil • Makanan & Minuman • ICT • Peralatan Transportasi • Alutsista Perkapalan • Jabodetabek Area 	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Peternakan • Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa sawit • Perakayuan • Besi baja • Bauksit • Batubara • Migas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian pangan • Kakao • Perikanan • Nikel • Migas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian pangan • Perikanan • Tembaga • Nikel • Migas 	

3.3.2. Keterampilan dan profesi baru di sektor yang berkembang pesat atau menjadi unggulan

Kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang relevan tidak hanya dipengaruhi oleh berbagai perencanaan ekonomi melainkan juga oleh dinamika yang terjadi di luar rancangan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, prospek ekonomi Indonesia 2030 diproyeksikan secara positif dengan titik pertumbuhan di wilayah perkotaan. Kelompok konsumen tumbuh pesat dan membuka peluang bisnis pada sektor layanan konsumen (terutama di layanan jasa keuangan). Indonesia diperkirakan akan menjadi pelaku ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan transaksi bisnis daring akan melonjak tinggi. Ini membuka peluang bagi bidang studi keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi yang relevan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mematangkan konsep dan kurikulum pemrograman komputer (*coding*) untuk SMK. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya wirausaha di bidang internet dan teknologi informasi serta sesuai dengan *roadmap e-commerce* yang berinisiatif mengembangkan SDM dengan menciptakan 1.000 usaha rintisan baru. Era digital yang ditandai dengan makin besarnya peran media sosial baik di ranah pribadi maupun bisnis, membuka ruang profesi baru misalnya untuk pengelolaan media sosial dan komunitas (*social media and community officer*). Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan di berbagai daerah saat ini akan meningkatkan kebutuhan akan SDM yang memiliki kompetensi di bidang sistem logistik dan rantai pasok.

Tiga sektor unggulan yaitu kemaritiman, pertanian, dan pariwisata juga memiliki berbagai peluang bagi pengembangan profesi dan keterampilan di masa depan. Kebijakan pembangunan yang hendak menjadikan Indonesia negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional perlu didukung dengan SDM yang memadai. Indonesia masih kekurangan tenaga kerja di industri pelayaran karena pada tahun 2015 masih baru terpenuhi 21% atau 1.500 orang dari kebutuhan yang mencapai 7.000 orang. Selain di bidang pelayaran, SDM dengan keterampilan yang relevan juga dibutuhkan pada berbagai level di bidang angkutan lepas pantai, kepelabuhan (baik untuk pelabuhan umum maupun terminal khusus), serta perikanan⁷. Kebijakan pangan yang dicerminkan melalui UU No. 8 tahun 2012 tentang Pangan menugaskan tercapainya Ketahanan Pangan Nasional. Tujuan tersebut hanya bisa tercapai jika kualitas dan kuantitas SDM pertanian yang mampu berperan dalam pembangunan pertanian yang makin sulit dan kompleks dengan berbagai tantangan seperti ancaman degradasi tanah dan konversi lahan, variabilitas dan ketidakpastian iklim, erosi sumber daya genetik karena hama dan penyakit, berlakunya sistem pasar bebas dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan tren penurunan minat tenaga kerja muda untuk memasuki sektor pertanian, bidang studi yang terkait dengan pertanian, perikanan dan peternakan perlu melakukan penataan ulang agar bisa berfokus pada kompetensi-kompetensi keahlian yang relevan dan dibutuhkan serta dapat menumbuhkan kembali minat siswa terhadap bidang-bidang tersebut. Ketersediaan SDM yang kompeten juga merupakan salah satu tantangan utama pengembangan pariwisata Indonesia. Mengingat produk utama pariwisata adalah jasa, unsur SDM sangat dominan. Oleh sebab itu pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pariwisata di berbagai bidang - seperti perhotelan, travel, transportasi, komunikasi dan informasi - harus mendapat perhatian utama. Dewasa ini tenaga kerja pariwisata lebih terkonsentrasi di kota-kota provinsi, sedangkan obyek/atraksi wisata banyak yang berlokasi di kabupaten bahkan kecamatan. Sebagian besar daerah yang memiliki obyek/atraksi wisata belum mempunyai tenaga kerja dengan kualifikasi bidang kepariwisataan apalagi dengan kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional. Potensi pariwisata di daerah seharusnya juga bisa dimanfaatkan secara optimal dan memunculkan usaha-usaha rintisan wisata.

3.4. VISI PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA 2030

Terwujudnya Pendidikan Kejuruan Indonesia yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dan diakui oleh dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) serta menguasai keterampilan abad 21 yang relevan

3.5. MISI PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA 2030

1. Menciptakan kerjasama efektif antara Pendidikan Kejuruan dengan dunia usaha/dunia industri;
2. Meningkatkan mutu peserta didik melalui sertifikasi kompetensi;
3. Mengembangkan mutu guru melalui pengalaman industri;
4. Meningkatkan mutu program dan satuan pendidikan melalui akreditasi;

BAB
04

Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan di Indonesia 2030

4.1. TARGET UTAMA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN INDONESIA 2030

Uraian tentang kondisi umum Pendidikan Menengah Kejuruan di Indonesia menunjukkan kompleksitas pengelolaan dan pengembangan subsistem pendidikan ini. Tantangan yang harus dihadapi beragam, multi level dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh sebab itu upaya pengembangan harus memiliki fokus dan prioritas yang jelas serta menjadi komitmen seluruh pihak terkait.

Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan 2030 ini memiliki fokus pertama pada penyelarasan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan dunia usaha/dunia industri. Salah satu hal utama yang dianggap penting oleh seluruh pihak namun masih belum dapat dilaksanakan secara optimal adalah keterlibatan DU/DI dalam penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan. Keterlibatan DU/DI tersebut menjadi konteks bagi tiga fokus lainnya dalam pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan yaitu: (i) pengakuan kompetensi kerja lulusan; (ii) peningkatan pengalaman industri bagi guru; (iii) penjaminan mutu satuan atau program pendidikan unggulan. Empat fokus tersebut dirumuskan dalam empat target pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan 2030 sebagai berikut:

TABEL 4.1. Target Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan 2030

EMPAT SATU SMK		
Target 1	100% Keterlibatan industri	Industri terlibat secara sistematis dan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang relevan bagi penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan
Target 2	100% Sertifikasi Kompetensi Lulusan SMK	Kompetensi kerja lulusan SMK mendapat pengakuan dari dunia usaha/dunia industri
Target 3	100% Guru SMK memiliki pengalaman industri	Seluruh guru SMK memiliki pengalaman magang dan/atau pelatihan di industri yang relevan dengan bidang keahlian yang diampunya
Target 4	100% Akreditasi A, khususnya pada Satuan dan Program Pendidikan Unggulan	Seluruh satuan dan program pendidikan khususnya bidang maritim, pertanian, pariwisata dan teknologi informasi mendapat peringkat akreditasi A

4.2. TAHAPAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN INDONESIA

Tahapan pelaksanaan pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan Indonesia menuju 2030 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.2. Tahapan Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan 2030

Fase	Periode	Kegiatan
Fase I	2016 - 2020	Refokus (<i>Refocusing</i>) Menata ulang fokus dan prioritas Pendidikan Kejuruan untuk meningkatkan kualitas
Fase II	2021 - 2025	Perluasan (<i>Scaling Up</i>) Mengembangkan akses dan meningkatkan kuantitas SMK bermutu melalui sistem berbagi
Fase III	2026 - 2030	Kesinambungan (<i>Continuity</i>) Menjaga keberlanjutan dan meningkatkan daya saing

4.3. KEGIATAN

Pencapaian empat target pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan 2030 (4 SATA-SMK) dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Target 1: 100% Keterlibatan Industri	
Periode	Kegiatan
Fase 1 (2016-2020): Fokus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan dan rangkaian dialog intensif antara pemerintah (baik Pusat maupun Daerah), institusi pendidikan, dan perwakilan dari DU/DI (KADIN, asosiasi profesi, asosiasi pengusaha) untuk mencapai kesepakatan tentang kerjasama pengembangan Pendidikan Kejuruan berdasarkan prinsip saling menguntungkan (mutual benefit). Perspektif yang sama dan kesepakatan perlu dicapai tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Arah pengembangan Pendidikan Kejuruan yang mempertimbangkan: (i) kebutuhan DU/DI (baik terkait pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja dari lulusan); (ii) minat studi peserta didik; (iii) kapasitas Pendidikan Kejuruan; b. Mekanisme yang efektif serta insentif yang sesuai untuk mendorong kolaborasi antara Pendidikan Kejuruan dan industri (identifikasi dan kajian tentang potensi perluasan perlu dilakukan terhadap model dan best practices kerjasama yang sudah ada dan berhasil). Hal ini mencakup juga pengembangan dan pelaksanaan metode komunikasi yang efektif antara SMK dengan DU/DI; c. Penanggung jawab serta pelaksana kerjasama Pendidikan Kejuruan dengan DU/DI di berbagai tingkat (pusat, daerah dan sekolah); d. Kerangka kebijakan, regulasi serta pendanaan untuk melaksanakan kerjasama antara Pendidikan Kejuruan dan industri secara efektif. 2. Merumuskan bidang-bidang kerjasama dan peran para pihak serta melaksanakan kerjasama tersebut melalui mekanisme yang efektif dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan standar kompetensi (skema kompetensi) yang menjadi dasar pembuatan/ pemutakhiran kurikulum; b. Pengembangan teaching factory di SMK sebagai metode pembelajaran; c. Perancangan program dan penyediaan kesempatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) bagi siswa SMK (penyediaan pedoman pelaksanaan Prakerin termasuk dalam hal penyusunan jadwal yang sinergi dengan proses di perusahaan); d. Perancangan program dan penyediaan tempat magang dan pelatihan di industri bagi guru SMK; e. Penyediaan instruktur dari DU/DI sebagai guru produktif tamu di SMK; f. Penempatan lulusan; g. Penyusunan kebijakan dan rencana pengembangan Pendidikan Kejuruan (terutama untuk diintegrasikan dalam Renstra 2020 – 2024), termasuk dalam membangun infrastruktur kompetensi (pembuatan standar kompetensi, LSP, TUK); h. Pengajaran dan penilaian transferable skills (termasuk dalam pengembangan karakter secara umum) yang membentuk sikap kerja industri pada siswa; i. Penjaminan mutu melalui pelaksanaan survei kepuasan industri dan penelusuran tamatan; j. Penjajakan kemungkinan untuk mensyaratkan sertifikat kompetensi dalam rekrutmen oleh industri (Industri memberikan pengakuan terhadap sertifikat kompetensi dan menggunakannya dalam kebijakan Pengembangan SDM-nya).

Target 1: 100% Keterlibatan Industri

Periode	Kegiatan
Fase 2 (2021-2025): Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> Memperluas pelaksanaan kerjasama pada skala yang lebih besar (jumlah sekolah, jumlah perusahaan dan lokasi/daerah) terutama dalam: <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>teaching factory</i> di SMK sebagai metode pembelajaran; Perancangan program dan penyediaan kesempatan prakerin bagi siswa SMK; Perancangan program dan penyediaan tempat magang di industri bagi guru SMK; Penyediaan instruktur dari DU/DI sebagai guru produktif tamu di SMK; Penempatan lulusan. Melanjutkan penyusunan standar kompetensi (skema kompetensi) yang menjadi dasar penyusunan/ pemutakhiran kurikulum. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut kerjasama Pendidikan Kejuruan dan DU/DI berdasarkan prinsip saling menguntungkan (<i>mutual benefit</i>).
Fase 3 (2025-2030): Kesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> Melanjutkan pelaksanaan kerjasama dalam: <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>teaching factory</i> di SMK sebagai metode pembelajaran; Perancangan program dan penyediaan kesempatan prakerin bagi siswa SMK; Perancangan program dan penyediaan tempat magang di industri bagi guru SMK; Penyediaan instruktur dari DU/DI sebagai guru produktif tamu di SMK. Penempatan lulusan. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut kerjasama Pendidikan Kejuruan dan industri berdasarkan prinsip saling menguntungkan (<i>mutual benefit</i>).

Target 2: 100% Sertifikasi Kompetensi Lulusan SMK

Periode	Kegiatan
Fase 1 (2016-2020): Fokus	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun standar kompetensi (skema kompetensi) untuk seluruh paket keahlian dalam spektrum Pendidikan Kejuruan 2013 dengan melibatkan DU/DI (terutama asosiasi profesi) dan BNSP. Menyiapkan SMK menjadi LSP-P1 (lembaga sertifikasi pihak pertama) dengan melibatkan BNSP; <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadartahuan di lingkungan satuan pendidikan tentang pentingnya sertifikasi kompetensi lulusan dan dukungan pembentukan LSP-P1; Menyiapkan assessor sertifikasi kompetensi SMK yang memiliki pengalaman industri dan kompetensi yang relevan; Menyiapkan sarana dan prasarana sekolah agar memadai sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK); Menyiapkan materi uji kompetensi.
Fase 2 (2021-2025): Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> Melanjutkan penyusunan standar kompetensi (skema kompetensi) untuk seluruh paket keahlian dalam spektrum Pendidikan Kejuruan 2013 dengan melibatkan DU/DI (terutama asosiasi profesi) dan BNSP; Melanjutkan SMK menjadi LSP-P1 (lembaga sertifikasi pihak pertama) dengan melibatkan BNSP; <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadartahuan di lingkungan satuan pendidikan tentang pentingnya sertifikasi kompetensi lulusan dan dukungan pembentukan LSP-P1; Menyiapkan assessor sertifikasi kompetensi SMK yang memiliki pengalaman industri dan kompetensi yang relevan; Menyiapkan sarana dan prasarana sekolah agar memadai sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK); Menyiapkan materi uji kompetensi.

Fase 3 (2025-2030): Kesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian standar kompetensi (skema kompetensi) untuk seluruh paket keahlian dalam spektrum Pendidikan Kejuruan 2013 dengan melibatkan DU/DI (terutama asosiasi profesi) dan BNSP; 2. Re-sertifikasi SMK menjadi LSP-P1 (lembaga sertifikasi pihak pertama) dengan melibatkan BNSP; <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran di lingkungan satuan pendidikan tentang pentingnya sertifikasi kompetensi lulusan dan dukungan pembentukan LSP-P1; b. Menyiapkan assessor sertifikasi kompetensi SMK yang memiliki pengalaman industri dan kompetensi yang relevan; c. Menyiapkan sarana dan prasarana sekolah agar memadai sebagai Tempat Uji Kompetensi; d. Menyiapkan materi uji kompetensi. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja LSP-P1 dalam melakukan proses sertifikasi kompetensi kerja lulusan SMK.
Target 3: 100% Guru Mempunyai Pengalaman Industri	
Periode	Kegiatan
Fase 1 (2016-2020): Fokus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan terhadap pengalaman industri guru SMK . 2. Melakukan kajian/ review tentang peraturan, kebijakan, praktik yang telah berjalan serta kondisi yang dapat menjadi kendala bagi guru untuk mengikuti magang dan pelatihan di perusahaan (misalnya: kewajiban mengajar 24 jam/ minggu, pembiayaan, ketersediaan tempat magang di perusahaan dll) serta identifikasi berbagai alternatif solusinya. 3. Melakukan pendekatan dan rangkaian dialog intensif antara pemerintah (baik pusat maupun Daerah), perwakilan guru dan perwakilan dari DU/DI (KADIN, asosiasi profesi, asosiasi pengusaha) untuk mencapai kesepakatan tentang magang dan pelatihan guru di perusahaan. Perspektif yang sama dan kesepakatan perlu dicapai tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Arah peningkatan pengalaman industri guru SMK yang mempertimbangkan: (i) minat guru dan kebutuhan sekolah (ii) minat dan kebutuhan DU/DI; b. Mekanisme yang efektif serta insentif yang sesuai untuk mendorong kolaborasi antara Pendidikan Kejuruan dan industri. Identifikasi dan kajian tentang potensi perluasan perlu dilakukan terhadap models and best practices kerjasama yang sudah ada dan berhasil. c. Penanggung jawab serta pelaksana kerjasama Pendidikan Kejuruan dengan industri di berbagai tingkat (pusat, daerah dan sekolah); d. Kerangka kebijakan, regulasi serta pendanaan untuk melaksanakan magang dan pelatihan industri bagi guru SMK secara efektif. 4. Identifikasi dan kajian tentang models and best practices magang dan pelatihan guru SMK di industri yang sudah ada dan berhasil.
Fase 2 (2021-2025): Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan kesempatan magang dan pelatihan guru di DU/DI
Fase 3 (2025-2030): Kesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan dan pengkinian data tentang pemagangan dan pelatihan guru di DU/DI sebagai dasar pengembangan kebijakan selanjutnya; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan magang dan pelatihan guru di DU/DI.

Target 4: 100% Akreditasi A untuk Satuan dan Program Pendidikan Unggulan

Periode	Kegiatan
Fase 1 (2016-2020): Fokus	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadartahuan tentang tujuan penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi sebagai suatu proses peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara berkelanjutan;2. Melakukan pendampingan pada satuan dan program pendidikan agar siap untuk diakreditasi serta mampu meningkatkan kinerja dan mutu secara berkelanjutan;3. Menyiapkan asesor akreditasi Pendidikan Kejuruan dengan fokus utama pada bidang maritim, pertanian, pariwisata dan teknologi informasi yang memiliki pengalaman industri yang cukup dan menguasai kompetensi yang relevan;4. Menyediakan instrumen akreditasi Pendidikan Kejuruan dengan penekanan pada aspek pemenuhan syarat proses pembelajaran berbasis kompetensi;
Fase 2 (2021-2025): Perluasan	<ol style="list-style-type: none">1. Melanjutkan penyiapan asesor akreditasi Pendidikan Kejuruan bidang maritim, pertanian, pariwisata dan teknologi informasi yang memiliki pengalaman industri yang cukup dan menguasai kompetensi yang relevan;2. Pemutakhiran instrumen akreditasi Pendidikan Kejuruan dengan penekanan pada aspek pemenuhan syarat proses pembelajaran berbasis kompetensi;
Fase 3 (2025-2030): Kesinambungan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengumpulan dan pengkinian data tentang penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi sebagai dasar pengembangan kebijakan selanjutnya;2. Melakukan penguatan pada satuan dan program pendidikan dalam meningkatkan kinerja dan mutu secara berkelanjutan;3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi pada satuan dan program pendidikan agar relevan dengan kebutuhan DU/DI.

Lampiran

ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN PETA JALAN PENDIDIKAN KEJURUAN MENUJU 2030

Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Kejuruan Menuju 2030 berlangsung selama total enam bulan (Februari hingga Juli 2016). Secara umum, kegiatan penyusunan terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

a. Persiapan dan pengumpulan data tahap I (Februari 2016)

Kegiatan persiapan meliputi pembuatan rencana isi Peta Jalan, identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data sekunder dan referensi yang relevan serta pembentukan Tim Penyusun.

b. Pengumpulan data tahap II dan penulisan (Maret – Mei 2016)

Kegiatan pengumpulan data pada tahap II khususnya dilakukan melalui wawancara terhadap empat kategori narasumber: (i) Narasumber dari kementerian terkait (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian); (ii) Narasumber dari institusi pendidikan (baik negeri maupun swasta); (iii) Perwakilan DU/DI (di bidang konstruksi, manufaktur otomotif, IT, jasa); (iv) Narasumber dari institusi lain yang relevan dengan pendidikan menengah kejuruan/ pendidikan vokasi (Badan Nasional Sertifikasi Profesi, SEAMOLEC). Data (baik primer maupun sekunder) serta informasi dari berbagai referensi dianalisa dan menjadi bahan utama penulisan Peta Jalan.

c. Verifikasi data (Mei 2015)

Untuk menjamin ketepatan penggunaan data serta analisa dalam Draft Peta Jalan dilakukan verifikasi melalui diskusi terfokus yang diikuti oleh para narasumber dari empat kategori tersebut diatas. Diskusi dilaksanakan di Jakarta bulan Mei 2016 dan hasilnya menunjukkan bahwa para narasumber mengkonfirmasi ketepatan data yang mereka berikan saat wawancara serta analisisnya.

d. Validasi hasil dan finalisasi (Juni - Juli 2016)

Peta Jalan sebagai sebuah produk perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan para pengguna (pemangku kepentingan yang relevan), untuk itu pada tahap terakhir dilakukan konsultasi publik di dua kota yaitu Bekasi – Jawa Barat serta Semarang – Jawa Tengah. Kedua konsultasi publik tersebut dihadiri perwakilan dari SMK, Poltek, Dinas Pendidikan Kota, DU/DI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masukan dari Konsultasi Publik menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran utama dalam Peta Jalan (Target, Pentahapan dan Kegiatan) dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan.

Referensi

- ADB (2014). *Sustainable Vocational Training Toward Industrial Upgrading and Economic Transformation: A knowledge Sharing Experience*
- ADB and Towers Watson Study (2013). *Issues paper for Seminar on 'Jobs and Skills in the Twenty-First Century'*
- Clement, Prof. Dr. Ute (2014). *Improving the Image of Technical and Vocational Education and Training, GIZ. Coordinating Ministry for Economic Affairs Republic of Indonesia (2011). Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011 – 2025*
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (2002). *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia: Membangun Manusia Produktif*
- GIZ (2015). *Guidelines Designing TVET Measures*. Germany.
- ILO (2014). *ASEAN Community 2015: Managing Intergation for better jobs and shared poverty*. Bangkok.
- IMD World Competitive Center (2015). *IMD World Talent Report*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2015). *Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015 – 2019*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015). *Rencana Induk Wajib Belajar 12 Tahun*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan SMK (2015). *Selayang Pandang Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016). *Grand Design Pendidikan Kejuruan*.
- Kidwell, Frances L. And Thomas West (2012). *Lessons from Germany and the Future of Vocational Education*.
- McKinsey Global Institute (September 2012). *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*
- Ministry of Education and Culture of The Republic of Indonesia (1997). *Skills Toward 2020 For Global Era. Taskforce Report on The Development of Vocational Education and Training in Indonesia*.
- Ministry of Education and Culture (2013). *Overview of the Education Sector in Indonesia. Achievements and Challenges*
- OECD (2011). *OECD Reviews of Vocational Education and Training: Learning for Jobs. Pointers for Policy Development*.
- Samsudi (2005). *Pengembangan Model Sinkronisasi Kurikulum Program Produktif SMK Bidang Rekayasa. Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Dikti-DP3M*
- Satuan Tugas Perumus Kebijakan Pengembangan Pendidikan Kejuruan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995). *Laporan Interim: Keterampilan Menjelang 2020*.
- SEAMEO VOCHTECH (2014). *Integration of Transferable Skills in TVET Curriculum, Teaching-Learning and Assessment. Final Report*.
- SED TVET – GIZ (2012). *Kajian Kemitraan Dunia Usaha-Dunia Industri (DU/DI) dan Sekolah Menengah Kejuruan: Peluang dan Tantangan*.
- Skjaerlund, Gorm, Theo van der Loop (February 2015). *Supply of Non-formal Training in Indonesia. TNP2K Working paper 23*.
- Suliswanto, Harry; Thomas Russell (2012). *Study Report. Lesson Learned on Public – Private Alliances in the Vocational Education System of Indonesia*.
- Suto, Irenka (2013). *21st Century Skills: Ancient, Ubiquitous, Enigmatic?. A Cambridge Assessment Publication*.
- Suwarna, Achmad (1996). *Skills Toward 2020, A Plan to Improve and Coordinate Skills Training in Indonesia paper prepared for UESCO/ UNEVOC Regional Conference Royal Melbourne Institute of Technology Melbourne Australia 11 – 14 November 1996*
- The Economist Intelligence Unit Limited (2015). *Driving the skills agenda: Preparing students for the future. An Economist Intelligence Unit Report, sponsored by Google*.
- World Bank (2011). *Revitalizing Public Training Centers in Indonesia: Challenges and the Way Forward*
- Billet, Stephen (2011). *Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects*

